LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Gedung LKPP - Kompleks Rasuna Epicentrum
Jln. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan 12940
Telepon 021-2991 2450 (*hunting*) Faksimile 021-2991 2451 *Website* : www.lkpp.go.id

Nomor : 31910/D.2.2/11/2026 13 November 2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Implementasi SPSE versi 5 Tahap II

Yth.
1. Kepala UKPBJ
2. Pejabat Pembuat Komitmen
3. Pokja Pemilihan
4. Pejabat Pengadaan
5. Bendahara
pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terlampir

Sehubungan dengan percepatan transformasi digital di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sedang dilaksanakan oleh LKPP dan PT Telkom Indonesia, saat ini sedang dikembangkan Platform Pengadaan Nasional (yang selanjutnya disebut INAPROC) sebagai platform terpusat dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Pendukungnya. Implementasi proses pemilihan yang terintegrasi dengan Akun INAPROC akan diperluas untuk berbagai metode pemilihan pada kanal SPSE versi 5 (SPSE v5) di INAPROC.

Implementasi SPSE v5 telah dilaksanakan secara *piloting* dan secara terbatas pada Tahap I sebagai bagian dari persiapan penerapan secara nasional. Oleh karena itu untuk memperluas implementasi, dengan ini kami sampaikan bahwa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) sebagaimana terlampir ditetapkan sebagai pelaksana implementasi Tahap II penggunaan SPSE v5.

Dalam rangka memastikan implementasi SPSE v5 berjalan optimal dan lancar pada K/L/Pemda Saudara/i, berikut kami sampaikan terkait penggunaan SPSE v5 pada Tahap II sebagai berikut:

1. Paket pengadaan memiliki kriteria:
   a. menggunakan metode pemilihan Tender, Seleksi, Pengadaan Langsung dan/atau Penunjukan Langsung. Untuk penggunaan metode pemilihan Tender Cepat masih memanfaatkan SPSE versi sebelumnya;
   b. tidak termasuk program prioritas nasional atau program prioritas Presiden;
   c. tidak termasuk pekerjaan kompleks; dan
   d. tidak termasuk pekerjaan yang berisiko tinggi, khususnya yang berkaitan dengan keterbatasan waktu dan percepatan pelaksanaan pada akhir Tahun Anggaran 2026.
2. PPK pada K/L/Pemda sebagaimana terlampir dapat melakukan pembuatan paket pada SPSE v5 mulai tanggal diterbitkannya surat ini.
3. Pada saat SPSE v5 telah diimplementasikan pada K/L/Pemda Saudara/i, SPSE versi sebelumnya masih tetap dapat dimanfaatkan namun bersifat terbatas. Diharapkan agar Saudara/i mengutamakan dan mengoptimalkan penggunaan SPSE v5 untuk sebanyak mungkin paket pengadaan Tahun Anggaran 2026 yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Sehubungan dengan SPSE v5 akan diakses melalui Akun INAPROC, maka agar Saudara/i memastikan Kepala UKPBJ, PPK, PP, Pokja Pemilihan, dan Bendahara telah memiliki akses pada akun INAPROC (akun.inaproc.id).
5. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2025, telah ditetapkan tarif Penerimaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://eoffice.lkpp.go.id atau kunjungi halaman https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian
Token : 9aXmLo
Nomor Tiket : SK202611130011

Negara Bukan Pajak (PNBP) atas layanan pemilihan penyedia barang/jasa melalui sistem pengadaan secara elektronik. Berdasarkan hal tersebut, pengenaan tarif PNBP juga akan diberlakukan pada SPSE v5. Namun demikian, hal tersebut masih dikecualikan untuk paket pengadaan Tahun Anggaran 2026 pada implementasi Tahap I dan II ini.

6. Agar Saudara/i turut menyampaikan informasi pelaksanaan paket pengadaan pada SPSE v5 serta pendaftaran Akun INAPROC kepada seluruh Pelaku Usaha di lingkungan K/L/Pemda masing-masing.
7. Informasi lebih rinci terkait SPSE v5 akan disampaikan dalam pertemuan yang akan dijadwalkan kemudian.

Kami mohon kerja sama dan dukungan Saudara/i untuk mengoptimalkan penggunaan SPSE v5 pada Tahap II ini untuk mendukung kesiapan implementasi secara menyeluruh yang akan diterapkan untuk paket pengadaan dengan tahun anggaran 2027. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sistem Pengadaan Digital,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Sugianto

Tembusan :
1. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP
2. GM Government Infrastructure Services PT Telkom Indonesia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://eoffice.lkpp.go.id atau kunjungi halaman https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian
Token : 9aXmLo
Nomor Tiket : SK202611130011

Daftar Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
3. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
4. Kementerian Haji dan Umrah
5. Kementerian Hak Asasi Manusia
6. Kementerian Hukum
7. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
8. Kementerian Ketenagakerjaan
9. Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Republik Indonesia
10. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asas Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
11. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
12. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
13. Kementerian Koordinator Bidang Pangan
14. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
15. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
16. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
17. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
18. Kementerian Koperasi
19. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
20. Kementerian Pariwisata
21. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
22. Kementerian Pemuda dan Olahraga
23. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
24. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
25. Kementerian Perindustrian
26. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
27. Kementerian Sekretariat Negara
28. Kementerian Sosial
29. Kementerian Transmigrasi
30. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
31. Badan Gizi Nasional
32. Badan Informasi Geospasial
33. Badan Intelijen Negara
34. Badan Karantina Indonesia
35. Badan Keamanan Laut
36. Badan Kepegawaian Negara
37. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
38. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
39. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
40. Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa
41. Badan Pangan Nasional
42. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

43. Badan Pemeriksa Keuangan
44. Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional
45. Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara
46. Badan Pengawas Obat dan Makanan
47. Badan Pengawas Pemilihan Umum
48. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
49. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
50. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/BP Batam
51. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
52. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia
53. Badan Reforma Agraria Nasional
54. Badan Riset dan Inovasi Nasional
55. Badan Siber dan Sandi Negara
56. Badan Standardisasi Nasional
57. Dewan Perwakilan Rakyat
58. Kejaksaan Republik Indonesia
59. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
60. Komisi Pemberantasan Korupsi
61. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
62. Komisi Yudisial
63. Lembaga Administrasi Negara
64. Lembaga Ketahanan Nasional
65. Lembaga Komisi Pemilihan Umum
66. Lembaga Penyiaran Publik TVRI
67. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia
68. Mahkamah Agung
69. Mahkamah Konstitusi
70. Majelis Permusyarawatan Rakyat
71. Otorita Ibu Kota Nusantara
72. Perpustakaan Nasional
73. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
74. Radio Republik Indonesia
75. Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
76. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
77. Sekretariat Kabinet
78. Tentara Nasional Indonesia
79. TNI Angkatan Darat
80. TNI Angkatan Laut
81. TNI Angkatan Udara
82. Provinsi Aceh
83. Provinsi Bali
84. Provinsi Bangka Belitung
85. Provinsi Bengkulu
86. Provinsi Jambi
87. Provinsi Kalimantan Tengah
88. Provinsi Kalimantan Utara
89. Provinsi Kepulauan Riau

90. Provinsi Lampung
91. Provinsi Maluku
92. Provinsi Maluku Utara
93. Provinsi Nusa Tenggara Barat
94. Provinsi Nusa Tenggara Timur
95. Provinsi Papua Barat
96. Provinsi Papua Barat Daya
97. Provinsi Papua Pegunungan
98. Provinsi Papua Selatan
99. Provinsi Papua Tengah
100. Provinsi Sulawesi Barat
101. Provinsi Sulawesi Selatan
102. Provinsi Sulawesi Tengah
103. Provinsi Sulawesi Tenggara
104. Provinsi Sulawesi Utara
105. Provinsi Sumatera Selatan
106. Kabupaten Aceh Barat
107. Kabupaten Aceh Barat Daya
108. Kabupaten Aceh Besar
109. Kabupaten Aceh Selatan
110. Kabupaten Aceh Singkil
111. Kabupaten Aceh Tamiang
112. Kabupaten Aceh Tengah
113. Kabupaten Aceh Tenggara
114. Kabupaten Aceh Timur
115. Kabupaten Aceh Utara
116. Kabupaten Agam
117. Kabupaten Alor
118. Kabupaten Asahan
119. Kabupaten Asmat
120. Kabupaten Badung
121. Kabupaten Banggai
122. Kabupaten Banggai Kepulauan
123. Kabupaten Banggai Laut
124. Kabupaten Bangka
125. Kabupaten Bangka Barat
126. Kabupaten Bangka Selatan
127. Kabupaten Bangka Tengah
128. Kabupaten Bangkalan
129. Kabupaten Bangli
130. Kabupaten Bantaeng
131. Kabupaten Banyuasin
132. Kabupaten Banyuwangi
133. Kabupaten Barito Selatan
134. Kabupaten Barito Timur
135. Kabupaten Barito Utara
136. Kabupaten Barru
137. Kabupaten Batanghari

138. Kabupaten Batubara
139. Kabupaten Bekasi
140. Kabupaten Belitung
141. Kabupaten Belitung Timur
142. Kabupaten Belu
143. Kabupaten Bener Meriah
144. Kabupaten Bengkayang
145. Kabupaten Bengkulu Tengah
146. Kabupaten Bengkulu Utara
147. Kabupaten Berau
148. Kabupaten Biak Numfor
149. Kabupaten Bima
150. Kabupaten Bintan
151. Kabupaten Bireuen
152. Kabupaten Boalemo
153. Kabupaten Bogor
154. Kabupaten Bolaang Mongondow
155. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
156. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
157. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
158. Kabupaten Bombana
159. Kabupaten Bone
160. Kabupaten Bone Bolango
161. Kabupaten Boven Digoel
162. Kabupaten Buleleng
163. Kabupaten Bulukumba
164. Kabupaten Bulungan
165. Kabupaten Bungo
166. Kabupaten Buol
167. Kabupaten Buru
168. Kabupaten Buru Selatan
169. Kabupaten Buton
170. Kabupaten Buton Tengah
171. Kabupaten Buton Utara
172. Kabupaten Cianjur
173. Kabupaten Dairi
174. Kabupaten Deiyai
175. Kabupaten Deli Serdang
176. Kabupaten Dharmasraya
177. Kabupaten Dogiyai
178. Kabupaten Dompu
179. Kabupaten Donggala
180. Kabupaten Empat Lawang
181. Kabupaten Enrekang
182. Kabupaten Fakfak
183. Kabupaten Flores Timur
184. Kabupaten Garut
185. Kabupaten Gayo Lues

186. Kabupaten Gianyar
187. Kabupaten Gorontalo
188. Kabupaten Gorontalo Utara
189. Kabupaten Gowa
190. Kabupaten Gunung Mas
191. Kabupaten Halmahera Barat
192. Kabupaten Halmahera Selatan
193. Kabupaten Halmahera Tengah
194. Kabupaten Halmahera Timur
195. Kabupaten Halmahera Utara
196. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
197. Kabupaten Hulu Sungai Utara
198. Kabupaten Humbang Hasundutan
199. Kabupaten Indragiri Hilir
200. Kabupaten Indragiri Hulu
201. Kabupaten Indramayu
202. Kabupaten Intan Jaya
203. Kabupaten Jayapura
204. Kabupaten Jayawijaya
205. Kabupaten Jember
206. Kabupaten Jembrana
207. Kabupaten Jeneponto
208. Kabupaten Jepara
209. Kabupaten Kaimana
210. Kabupaten Kampar
211. Kabupaten Kapuas
212. Kabupaten Kapuas Hulu
213. Kabupaten Karanganyar
214. Kabupaten Karawang
215. Kabupaten Karimun
216. Kabupaten Karo
217. Kabupaten Katingan
218. Kabupaten Kaur
219. Kabupaten Kayong Utara
220. Kabupaten Keerom
221. Kabupaten Kepahiang
222. Kabupaten Kepulauan Anambas
223. Kabupaten Kepulauan Aru
224. Kabupaten Kepulauan Mentawai
225. Kabupaten Kepulauan Sangihe
226. Kabupaten Kepulauan Selayar
227. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
228. Kabupaten Kepulauan Sula
229. Kabupaten Kepulauan Talaud
230. Kabupaten Kepulauan Tanimbar
231. Kabupaten Kepulauan Yapen
232. Kabupaten Kerinci
233. Kabupaten Ketapang

234. Kabupaten Kolaka
235. Kabupaten Kolaka Timur
236. Kabupaten Kolaka Utara
237. Kabupaten Konawe
238. Kabupaten Konawe Kepulauan
239. Kabupaten Konawe Selatan
240. Kabupaten Konawe Utara
241. Kabupaten Kotawaringin Barat
242. Kabupaten Kuantan Singingi
243. Kabupaten Kulon Progo
244. Kabupaten Kuningan
245. Kabupaten Kupang
246. Kabupaten Kutai Barat
247. Kabupaten Kutai Kartanegara
248. Kabupaten Kutai Timur
249. Kabupaten Labuhanbatu
250. Kabupaten Labuhanbatu Selatan
251. Kabupaten Labuhanbatu Utara
252. Kabupaten Lahat
253. Kabupaten Lamandau
254. Kabupaten Lampung Selatan
255. Kabupaten Lampung Tengah
256. Kabupaten Lampung Utara
257. Kabupaten Landak
258. Kabupaten Langkat
259. Kabupaten Lanny Jaya
260. Kabupaten Lebak
261. Kabupaten Lebong
262. Kabupaten Lembata
263. Kabupaten Lima Puluh Kota
264. kabupaten Lingga
265. Kabupaten Lombok Tengah
266. Kabupaten Lombok Utara
267. Kabupaten Luwu
268. Kabupaten Luwu Timur
269. Kabupaten Luwu Utara
270. Kabupaten Mahakam Ulu
271. Kabupaten Majalengka
272. Kabupaten Majene
273. Kabupaten Malaka
274. Kabupaten Malinau
275. Kabupaten Maluku Barat Daya
276. Kabupaten Maluku Tengah
277. Kabupaten Maluku Tenggara
278. Kabupaten Mamasa
279. Kabupaten Mamberamo Raya
280. Kabupaten Mamberamo Tengah
281. Kabupaten Mamuju

282. Kabupaten Mamuju Tengah
283. Kabupaten Mandailing Natal
284. Kabupaten Manggarai
285. Kabupaten Manggarai Barat
286. Kabupaten Manggarai Timur
287. Kabupaten Manokwari
288. Kabupaten Manokwari Selatan
289. Kabupaten Mappi
290. Kabupaten Maros
291. Kabupaten Maybrat
292. Kabupaten Melawi
293. Kabupaten Mempawah
294. Kabupaten Merauke
295. Kabupaten Mesuji
296. Kabupaten Mimika
297. Kabupaten Minahasa
298. Kabupaten Minahasa Selatan
299. Kabupaten Minahasa Tenggara
300. Kabupaten Minahasa Utara
301. Kabupaten Mojokerto
302. Kabupaten Morowali
303. Kabupaten Morowali Utara
304. Kabupaten Muara Enim
305. Kabupaten Mukomuko
306. Kabupaten Muna
307. Kabupaten Muna Barat
308. Kabupaten Murung Raya
309. Kabupaten Musi Rawas
310. Kabupaten Musi Rawas Utara
311. Kabupaten Nabire
312. Kabupaten Nagan Raya
313. Kabupaten Nagekeo
314. Kabupaten Natuna
315. Kabupaten Nduga
316. Kabupaten Ngada
317. Kabupaten Nganjuk
318. Kabupaten Nias
319. Kabupaten Nias Barat
320. Kabupaten Nias Selatan
321. Kabupaten Nias Utara
322. Kabupaten Nunukan
323. Kabupaten Ogan Ilir
324. Kabupaten Ogan Komering Ulu
325. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
326. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
327. Kabupaten Pacitan
328. Kabupaten Padang Lawas
329. Kabupaten Padang Lawas Utara

330. Kabupaten Pakpak Bharat
331. Kabupaten Pamekasan
332. Kabupaten Pandeglang
333. Kabupaten Pangandaran
334. Kabupaten Paniai
335. Kabupaten Pasaman
336. Kabupaten Pasangkayu
337. Kabupaten Paser
338. Kabupaten Pati
339. Kabupaten Pegunungan Arfak
340. Kabupaten Pegunungan Bintang
341. Kabupaten Pekalongan
342. Kabupaten Pelalawan
343. Kabupaten Penajam Paser Utara
344. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
345. Kabupaten Pesawaran
346. Kabupaten Pesisir Barat
347. Kabupaten Pidie
348. Kabupaten Pidie Jaya
349. Kabupaten Pinrang
350. Kabupaten Pohuwato
351. Kabupaten Polewali Mandar
352. Kabupaten Ponorogo
353. Kabupaten Poso
354. Kabupaten Pringsewu
355. Kabupaten Probolinggo
356. Kabupaten Pulang Pisau
357. Kabupaten Pulau Morotai
358. Kabupaten Pulau Taliabu
359. Kabupaten Puncak
360. Kabupaten Puncak Jaya
361. Kabupaten Purbalingga
362. Kabupaten Raja Ampat
363. Kabupaten Rejang Lebong
364. Kabupaten Rokan Hilir
365. Kabupaten Rokan Hulu
366. Kabupaten Rote Ndao
367. Kabupaten Sabu Raijua
368. Kabupaten Sambas
369. Kabupaten Samosir
370. Kabupaten Sampang
371. Kabupaten Sanggau
372. Kabupaten Sarmi
373. Kabupaten Sarolangun
374. Kabupaten Sekadau
375. Kabupaten Seluma
376. Kabupaten Seram Bagian Barat
377. Kabupaten Seram Bagian Timur

378. Kabupaten Serang
379. Kabupaten Serdang Bedagai
380. Kabupaten Seruyan
381. Kabupaten Siak
382. Kabupaten Sidenreng Rappang
383. Kabupaten Sigi
384. Kabupaten Sijunjung
385. Kabupaten Sikka
386. Kabupaten Simalungun
387. Kabupaten Simeulue
388. Kabupaten Sinjai
389. Kabupaten Sintang
390. Kabupaten Situbondo
391. Kabupaten Solok
392. Kabupaten Solok Selatan
393. Kabupaten Soppeng
394. Kabupaten Sorong
395. Kabupaten Sorong Selatan
396. Kabupaten Subang
397. Kabupaten Sukamara
398. Kabupaten Sumba Barat
399. Kabupaten Sumba Barat Daya
400. Kabupaten Sumba Tengah
401. Kabupaten Sumba Timur
402. Kabupaten Sumbawa
403. Kabupaten Supiori
404. Kabupaten Tabanan
405. Kabupaten Takalar
406. Kabupaten Tambrauw
407. Kabupaten Tana Tidung
408. Kabupaten Tana Toraja
409. Kabupaten Tanah Datar
410. Kabupaten Tanah Laut
411. Kabupaten Tanggamus
412. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
413. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
414. Kabupaten Tapanuli Selatan
415. Kabupaten Tapanuli Tengah
416. Kabupaten Tapanuli Utara
417. Kabupaten Tasikmalaya
418. Kabupaten Tebo
419. Kabupaten Teluk Bintuni
420. Kabupaten Teluk Wondama
421. Kabupaten Temanggung
422. Kabupaten Timor Tengah Selatan
423. Kabupaten Timor Tengah Utara
424. Kabupaten Toba
425. Kabupaten Tojo Una-Una

426. Kabupaten Tolikara
427. Kabupaten Tolitoli
428. Kabupaten Toraja Utara
429. Kabupaten Tulang Bawang
430. Kabupaten Tulang Bawang Barat
431. Kabupaten Tulungagung
432. Kabupaten Waropen
433. Kabupaten Way Kanan
434. Kabupaten Wonogiri
435. Kabupaten Wonosobo
436. Kabupaten Yahukimo
437. Kabupaten Yalimo
438. Kota Ambon
439. Kota Banda Aceh
440. Kota Bandar Lampung
441. Kota Banjar
442. Kota Batu
443. Kota Baubau
444. Kota Bengkulu
445. Kota Bima
446. Kota Binjai
447. Kota Bitung
448. Kota Blitar
449. Kota Bontang
450. Kota Denpasar
451. Kota Gorontalo
452. Kota Gunungsitoli
453. Kota Jambi
454. Kota Jayapura
455. Kota Kediri
456. Kota Kendari
457. Kota Kotamobagu
458. Kota Kupang
459. Kota Langsa
460. Kota Lubuklinggau
461. Kota Manado
462. Kota Medan
463. Kota Metro
464. Kota Padang
465. Kota Padang Panjang
466. Kota Padang Sidempuan
467. Kota Pagar Alam
468. Kota Palangka Raya
469. Kota Palembang
470. Kota Palopo
471. Kota Palu
472. Kota Parepare
473. Kota Pariaman

474. Kota Pasuruan
475. Kota Payakumbuh
476. Kota Pekanbaru
477. Kota Pematangsiantar
478. Kota Prabumulih
479. Kota Sabang
480. Kota Samarinda
481. Kota Sawahlunto
482. Kota Sibolga
483. Kota Singkawang
484. Kota Solok
485. Kota Sorong
486. Kota Subulussalam
487. Kota Sukabumi
488. Kota Sungai Penuh
489. Kota Tanjung Pinang
490. Kota Tanjungbalai
491. Kota Tarakan
492. Kota Tebing Tinggi
493. Kota Tegal
494. Kota Ternate
495. Kota Tidore Kepulauan
496. Kota Tomohon
497. Kota Tual